

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah agar berjalan efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan, perlu menyusun Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 bahwa pemerintah Daerah yang telah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi harus menyesuaikan dengan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road MAP Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2022-2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Reformasi Birokrasi adalah upaya perbaikan birokrasi pada delapan area pengungkit meliputi: manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Road Map Reformasi Birokrasi adalah rencana strategis sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah agar berjalan efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:
 - a. bab I : Pendahuluan
 - b. bab II : Evaluasi Capaian Pelaksanaan Reformasi Reformasi Birokrasi Tahun 2019-2021;
 - c. bab III : Analisis Lingkungan Strategis, Arah, Strategi dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024;
 - d. bab IV : Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024; dan
 - e. bab V : Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai rincian dan uraian Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan secara sistematis, partisipatif dan kolaboratif melibatkan unsur ekosistem penyelenggaraan reformasi birokrasi yang terdiri dari:
 - a. tim reformasi birokrasi pemerintah Daerah;
 - b. tim reformasi birokrasi PD;
 - c. agen perubahan;
 - d. akademisi, masyarakat, dan dunia usaha; dan
 - e. sekretariat reformasi birokrasi pemerintah Daerah.

- (2) PD pengampu/*leading sector area* perubahan yang merupakan bagian dari kelompok kerja area perubahan atau sebutan lainnya pada tim reformasi birokrasi pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menindaklanjuti Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan cara sebagai berikut:
- a. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, advokasi pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi sesuai area perubahan yang diampu secara berkala pada PD pelaksana reformasi birokrasi;
 - b. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi sesuai area perubahan yang diampu secara berkala; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi sesuai area perubahan yang diampu secara berkala kepada Sekretaris Daerah melalui biro organisasi sekretariat Daerah sebagai sekretariat Reformasi Birokrasi pemerintah Daerah.
- (3) Tim Reformasi Birokrasi PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menindaklanjuti Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan cara sebagai berikut:
- a. menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi PD;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi PD dengan PD pengampu/*leading sector* dan/atau sekretariat Reformasi Birokrasi pemerintah Daerah;
 - c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi PD secara berkala;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi PD secara berkala; dan
- 

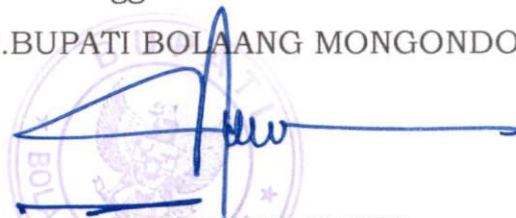
- e. melaksanakan pelaporan pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi sesuai area perubahan yang diampu secara berkala kepada sekretaris Daerah melalui biro organisasi sekretariat Daerah sebagai sekretariat Reformasi Birokrasi pemerintah Daerah.
- (4) Agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menindaklanjuti Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan cara sebagai berikut:
- a. menginisiasi ide-ide perubahan dan memfasilitasi upaya-upaya perubahan bersama tim Reformasi Birokrasi PD; dan
 - b. membantu percepatan informasi dan komunikasi yang terkait dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi ke dalam dan ke luar PD.
- (5) Akademisi, masyarakat, dan dunia usaha dapat memberikan masukan kebijakan, kritik, dan saran pelaksanaan reformasi birokrasi baik secara langsung maupun melalui media dalam jaringan/online kepada biro organisasi sekretariat Daerah sebagai sekretariat Reformasi Birokrasi pemerintah Daerah.
- (6) Sekretariat Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menjalankan fungsi sebagai unit help desk yang membantu koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan reformasi birokrasi dengan cara sebagai berikut:
- a. menampung data dan informasi yang berkaitan dengan masukan kebijakan, saran, dan kritik atas pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - b. mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi yang diterima baik secara langsung maupun melalui media dalam jaringan/*online*;
 - c. melayani kebutuhan data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - d. memfasilitasi publikasi pelaksanaan reformasi birokrasi; dan

- e. menjalankan fungsi sebagai penghubung antar unsur ekosistem penyelenggaraan reformasi birokrasi baik secara langsung maupun melalui media dalam jaringan/*online*.

BAB IV
KETENTUAN UMUM
Pasal 5

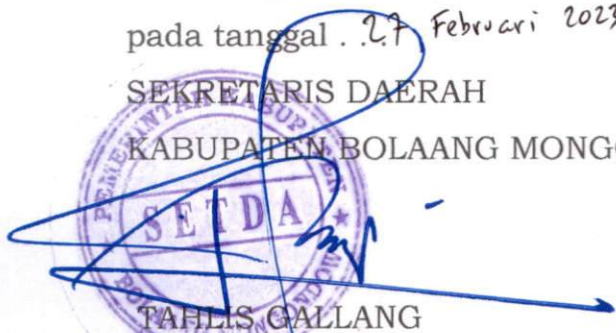
Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal . 27 Februari 2023
Pj.BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

Diundangkan di Lolak
pada tanggal . 27 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,



TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN . 2023
NOMOR . 10

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	
2	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 10 Tahun 2023

TANGGAL : 27 Februari 2023

TENTANG : ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022-2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sampai dengan tahun 2020 setidaknya telah berlangsung selama 2 (Dua) Tahun. Selama kurun waktu 2 Tahun dimaksud terdapat penanda-penanda capaian keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi, antara lain sebagai berikut:

1. Periode Reformasi Birokrasi 2015-2019. Pada periode ini upaya reformasi semakin tertata dengan dukungan Program Kegiatan, yang terdiri Sampai dengan tahun 2019 dan 2020 telah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK untuk ke 2 kali; Nilai SAKIP CC untuk penilaian tahun 2019; Indeks Reformasi Birokrasi C, inovasi pelayanan Publik untuk Kategori Se Sulawesi Utara mendapat Peringkat 3, Kematangan Sistem Merit pada skore 0,03 dari maksimal skor 400 dengan Predikat Buruk serta redesign program/kegiatan hanya menjadi 112 program dan 172 kegiatan untuk mengurangi belanja pendukung.
2. Periode Reformasi Birokrasi 2019 – 2021, ditandai dengan penerapan organisasi berbasis kinerja (*Performance Based Organization*); desain struktur organisasi inline dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow; setiap unit eselon III minimal mengawal capaian kinerja 1 (satu) program; pengurangan 197 jabatan struktural; memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK untuk ke sepuluh kali sampai dengan penilaian tahun 2019; Nilai SAKIP B untuk penilaian tahun 2020 dan 2019; Indeks Reformasi Birokrasi C untuk penilaian tahun 2020; Perbaikan kualitas perencanaan dan penganggaran melalui Standar Belanja berbasis Program; redesign program/kegiatan hanya menjadi 112 program dan 172 kegiatan untuk mengurangi belanja pendukung; menghilangkan honor-honor Tim untuk diformulasikan sebagai tambahan penghasilan pegawai berbasis kinerja

organisasi, kinerja pegawai dan kelas jabatan.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020- 2024, saat ini Reformasi Birokrasi Nasional telah masuk kepada periode ketiga atau terakhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2010 - 2025. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas serta tata kelola yang semakin bersih, efektif dan efisien.

Diperlukan upaya yang lebih terstruktur, sistematis dan masif untuk dapat mencapai target reformasi birokrasi periode ketiga nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, maka disusun Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 – 2024, Hal ini perlu dilakukan untuk menjawab tantangan perubahan yang semakin kompleks.

B Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020- 2024
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14);.

C Maksud dan Tujuan

Pengaturan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2022 – 2024 dimaksudkan untuk:

1. Menyesuaikan dengan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2020 – 2024.
2. Sebagai pedoman sasaran, arah, strategi, aksi dan mekanisme

pelaksanaan reformasi birokrasi Tahun 2022 – 2024.

Adapun tujuan pengaturan adalah untuk “menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih “ dengan sasaran sebagai berikut:

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
2. Birokrasi yang Kapabel;
3. Pelayanan Publik yang Prima.

Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi tersebut diyakini merupakan pengungkit utama dari pencapaian tujuan dan berbagai indikatornya. Selain itu penetapan ketiga sasaran di atas juga mempertimbangkan keberlanjutan dari sasaran Reformasi Birokrasi periode sebelumnya dengan memperhatikan lingkungan strategis pemerintah. Berikut gambaran hubungan sasaran Reformasi Birokrasi periode sebelumnya dengan sasaran Reformasi Birokrasi 2020-2024 Nasional.

BAB II

EVALUASI CAPAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2019 – 2021

A. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2019 - 2021

Evaluasi terhadap capaian pelaksanaan reformasi birokrasi diperlukan sebagai dasar merumuskan arah, strategi dan penjabaran operasional pelaksanaan reformasi birokrasi tahap selanjutnya. Capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi periode Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 2019-2020, berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, Simpulan Hasil Evaluasi adalah sebagai Berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 adalah 50,22 dengan Kategori “CC”. Rincian Hasil sebagai berikut:

Tabel 1 Capaian Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sampai dengan Tahun 2021

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai		Keterangan
			2020	2021	
A.	Komponen Pengungkit				
	I. Pemenuhan	20,00	6,06	9,48	Bobot Meningkatkan 3,42
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	2,85	3,46	Bobot Meningkatkan 0,61
	III. Reform	30,00	4,42	9,43	Bobot Meningkatkan 5,01
	Total Komponen Pengungkit	60,00	13,33	22,37	Bobot Meningkatkan 9.04
B.	Komponen Hasil				
1.	Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan	10	6,05	7,09	Bobot Meningkatkan 1.04
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10	5,18	8,89	Bobot Meningkatkan 3.71
3.	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10	5,15	8,28	Bobot Meningkatkan 3,13

4.	Kinerja Organisasi	10	4,44	3,59	Bobot Turun 0.85
Total Komponen Hasil		40,00	20,81	27,85	Bobot Meningkat 7.04
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		100,00	34,14	50,22	Indeks Naik sebesar 16.08

2 Hasil Antara Area Perubahan paa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow sebanyak 8 Hasil antara telah dilakukan pengukuran oleh instansi leading sektor, dengan rincian sebagai berikut :

No	Hasil Antara	Skala	Nilai	Sumber Data
1.	ASN Profesional	0 - 100	31,58	Badan Kepegawaian Negara
2.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1 - 5	2,03	Kementerian PANRB
3.	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0 - 100	27,78	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia
4.	Kualitas Pelayanan Publik	0 - 5	2,14	Kementerian PANRB
5.	Kapabilitas APIP	0 - 5	2	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6.	Maturitas SPIP	0 - 5	2	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
7.	Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik	0 - 100	57,76	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
8.	Kualitas Pengelolaan Arsip	0 - 100	8,13	Arsip Nasional Republik Indonesia

Dibanding dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2021 terdapat beberapa peningkatan kualitas hasil antara yang baru dilakukan pengukuran Tahun 2021, diantaranya kualitas kebijakan, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kualitas Pelayanan Publik, Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik, dan Kualitas Pengelolaan Arsip. Untuk hasil Antara yang tidak dilakukan Pengukuran pada Tahun 2021, maka menggunakan Data sebelumnya.

Catatan dan Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow telah berupaya meningkatkan kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi. Namun terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mengoptimalkan Program Reformasi Birokrasi di antaranya sebagai berikut :

- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow belum terinternalisasi secara efektif dan menyeluruh kepada seluruh unit kerja hingga individu pegawai, mulai dari level jabatan tertinggi hingga ke level jabatan terendah. Hal ini mengakibatkan belum adanya perubahan berkelanjutan terhadap pola pikir dan budaya kerja yang merupakan tujuan akhir dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- Road Map Reformasi Birokrasi belum sepenuhnya menggambarkan sasaran dan indikator yang terukur dari delapan area perubahan. Selain itu, rencana kerja Reformasi Birokrasi sebagian besar belum dilaksanakan dengan optimal serta pelaksanaan reformasi birokrasi lebih banyak dilakukan pada Perangkat Daerah (PD) tertentu saja yang terlibat dalam kelompok kerja Reformasi Birokrasi, sedangkan pada sebagian besar PD yang lain, pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum

dilakukan;

- c. Rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum sepenuhnya mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, hal ini mengakibatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan belum sepenuhnya berdasarkan permasalahan, sehingga hasil dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan atau isu yang ada di organisasi;
- d. Agen perubahan belum memiliki rencana perubahan yang terukur, sehingga upaya Agen Perubahan sebagai katalisator perubahan untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan belum terlihat secara nyata;
- e. Secara formal nilai budaya kerja belum menyesuaikan *core value* ASN BerAKHLAK serta belum melakukan penilaian terhadap tingkat pemahaman pegawai mengenai 8 (delapan) area pembangunan Reformasi Birokrasi dan nilai budaya kerja;
- f. Belum sepenuhnya terdapat identifikasi, pemetaan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan secara komprehensif dan menyeluruh. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow belum sepenuhnya optimal dalam melakukan identifikasi terhadap dampak dari suatu kebijakan yang sudah ada atau yang akan disusun, sehingga upaya penataan yang dilakukan masih sebatas administratif dan belum berdampak terhadap peningkatan kinerja birokrasi;
- g. *Grand design* IT belum dijadikan dasar dalam pembangunan berbagai aplikasi yang ditujukan untuk mencapai kinerja, sehingga belum terlihat keterkaitan dan dampak antar aplikasi tersebut untuk mewujudkan kinerja;
- h. Peta proses bisnis yang dimiliki oleh organisasi belum sepenuhnya menggambarkan proses pencapaian kinerja utama organisasi, sehingga keterkaitan kinerja antar perangkat daerah dalam mendukung capaian kinerja organisasi belum terlihat;
- i. Rumusan pola mekanisme hubungan dan koordinasi antara kelompok jabatan fungsional dengan JPT sebagai hasil dari penyederhanaan birokrasi masih belum terlihat;
- j. Penataan sistem manajemen SDM belum berjalan optimal, masih berfokus pada pengelolaan administrasi kepegawaian. Selain itu, belum sepenuhnya terdapat inisiasi terhadap pengelolaan kinerja individu, pengelolaan kompetensi, dan pengelolaan karir sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas SDM Aparatur di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- k. Sebagai penguatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow telah memiliki sistem atau aplikasi monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja, namun aplikasi ini belum berjalan optimal karena belum sepenuhnya monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja diisi oleh PD;
- l. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) belum optimal menjalankan fungsinya sebagai *Quality Assurance* dan *Consulting*, karena belum terdapat perbaikan signifikan pada penguatan integritas dan pencapaian kinerja utama pada PD;
- m. Peran Tim Penilai Internal (TPI) sebagai evaluator dan pendamping serta pemberi rekomendasi perbaikan dalam pembangunan Zona Integritas pada unit kerja belum sepenuhnya optimal, sehingga success ra/e unit kerja yang mendapatkan predikat

unit kerja menuju WBK/WBBM belum begitu tinggi;

- n. Peningkatan kualitas pelayanan publik di setiap PD belum merata dilakukan, seperti pada pemanfaatan inovasi dan budaya pelayanan prima. Selain itu, inovasi yang dibangun pada PD belum sepenuhnya berdasarkan pada permasalahan yang ada dan belum disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan *stakeholder* atau masyarakat pengguna layanan, sehingga inovasi yang dilakukan belum sepenuhnya terlihat memberikan dampak peningkatan pelayanan publik;
- o. Hasil dari survei kepuasan masyarakat belum dijadikan acuan dalam proses monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, yang berpotensi adanya *gap* harapan dari masyarakat dengan pelayanan publik yang didapatkan, sehingga arah perbaikan pelayanan publik belum dapat disesuaikan dengan keinginan masyarakat.

Terkait komponen hasil, menunjukkan bahwa pada tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow memperoleh nilai yang cukup baik dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen Hasil	Skala	Nilai	Sumber Data
1	Opini BPK	Opini	WTP	Badan Pemeriksa Keuangan
2	Nilai SAKIP	0-100	58,42	Kementerian PANRB
3	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)	0-100	88,90	Kementerian PANRB
4	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	0-100	82,82	Survei Penilaian Integritas (SPI) Eksternal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
5	Survei Internal Organisasi	0-100	77,88	SPI Internal oleh KPK

Pada tahun 2021 terdapat perubahan metode pengukuran pada Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan survei internal organisasi yang menggunakan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

BAB III

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS, ARAH, STRATEGI DAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI 2022 – 2024

A. Analisis Lingkungan Strategis

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat utama keberhasilan pembangunan nasional. Program-program pembangunan akan berjalan dengan efektif dan efisien apabila ditangani oleh birokrasi yang professional, berintegritas dan memiliki orientasi pelayanan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik juga akan

meningkatkan kepercayaan publik dan dunia usaha sehingga meningkatkan daya saing investasi.

Reformasi birokrasi menjadi jalan satu-satunya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sejak ditetapkan sebagai prioritas nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025, saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi telah memasuki periode ketiga atau periode terakhir yang ditargetkan menghasilkan birokrasi yang berkualitas dunia. Birokrasi pada semua tingkatan (Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Pemerintah Daerah) ditargetkan sudah menjadi birokrasi kelas dunia yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Bersih, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang tercermin dari
 - a. Hasil survei eksternal (responden masyarakat) persepsi korupsi
 - b. Hasil survei internal (responden PNS) integritas organisasi.
 - c. Hasil survei internal (responden PNS) integritas jabatan.
2. Bekerja efektif, efisien dan akuntabel yang tercermin dari :
 - a. Nilai Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)
 - b. Opini BPK
3. Melayani secara prima dan profesional yang tercermin dari hasil survei eksternal persepsi pelayanan kepada pengguna layanan.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2020) mencatat kendala-kendala pelaksanaan reformasi birokrasi yang umum dihadapi dan berpotensi menghambat pencapaian target reformasi birokrasi periode ketiga sebagai berikut:

1. Pelaksanaan reformasi birokrasi belum merata di semua Unit Kerja, masih dipersepsikan sebagai proyek yang menjadi tugas Unit Kerja tertentu saja.
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi masih belum terintegrasi dalam platform yang sama, masih berjalan sendiri-sendiri
3. Pelaksanaan reformasi birokrasi tidak didasarkan pada pemecahan akar permasalahan utama Unit Kerja.
4. Fungsi pengawasan, khususnya pengawasan melekat oleh atasan langsung belum optimal.

Pelaksanaan reformasi birokrasi juga dihadapkan pada isu/tantangan nasional dan global, antara lain meliputi:

1. Tantangan globalisasi dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG's*),
2. Revolusi Industri 4.0 yang ditandai masifnya penggunaan mobile internet, komputasi awan, kecerdasan buatan, maha data, dan Internet of Things (IoT) menjadi pemicu bagi kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk melakukan *transformasi digital*. Layanan mandiri, layanan bergerak, dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas bagi masyarakat menjadi trend pelayanan yang harus disiapkan.
3. Pandemi COVID-19 sebagai bencana non-alam yang membutuhkan anggaran yang sangat besar untuk pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial, mengharuskan pemerintah mencari terobosan cara-cara kerja yang jauh lebih efisien namun tetap efektif.
4. *Agile Organization*, yakni bagaimana birokrasi pemerintah menjadi responsif, adaptif, lentur dan fleksibel terhadap tuntutan perubahan/situasi yang terjadi

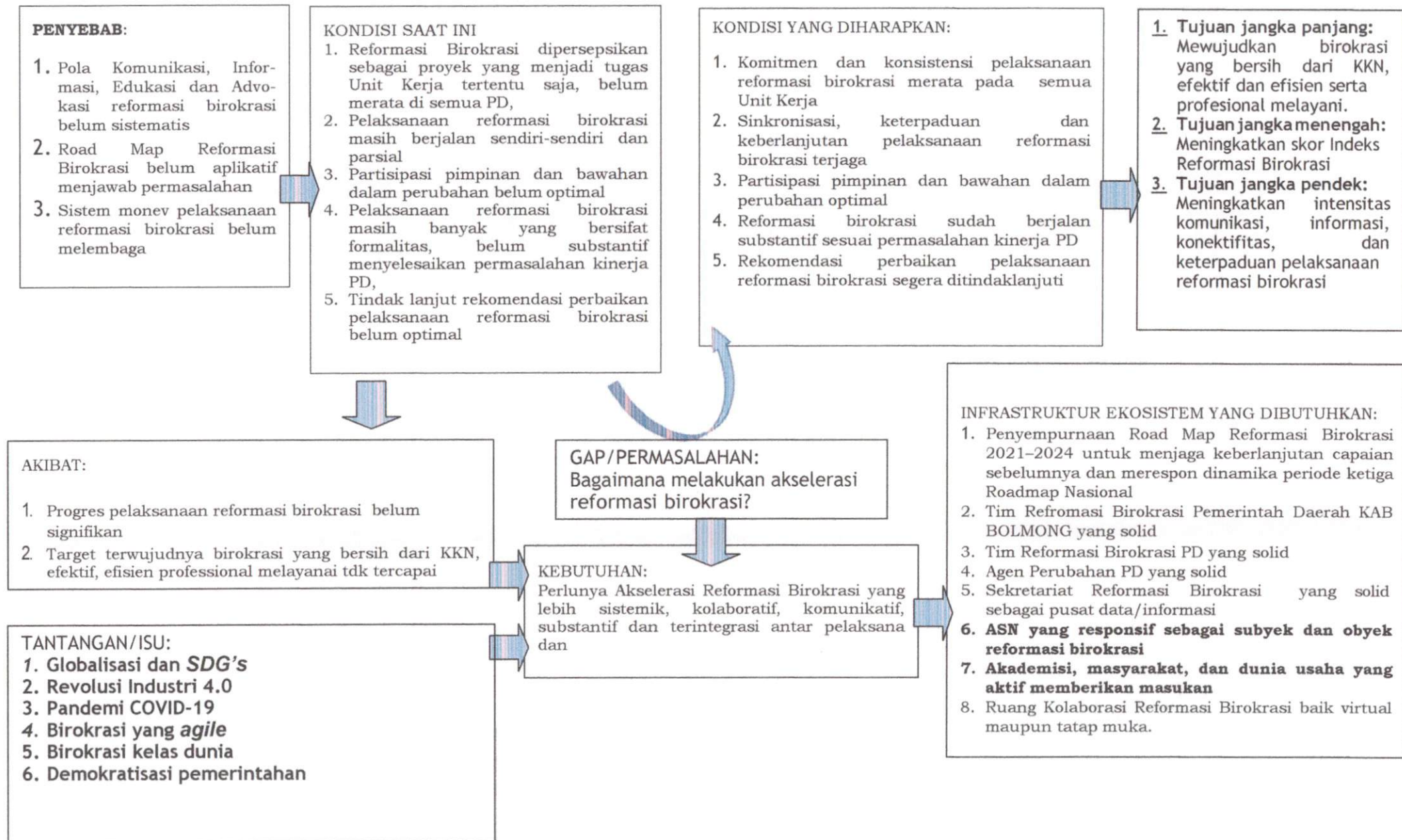
pada lingkungan strategis.

5. Tantangan demokratisasi pemerintahan, mengharuskan pemerintah mendorong partisipasi dan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan

Terhadap permasalahan dan tantangan sebagaimana tersebut di atas, perlu dirumuskan suatu strategi percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang lebih riil menjawab permasalahan yang terjadi di lapangan, dengan mengedepankan kolaborasi dan keterlibatan banyak pihak. Pelibatan ini dilakukan secara vertikal, yaitu melibatkan setiap level jabatan dalam pemerintahan dari level paling strategis sampai paling teknis, maupun secara horizontal yaitu melibatkan banyak kementerian/lembaga terkait, dan unsur di luar pemerintahan seperti masyarakat, dunia usaha, dan akademisi. Gambar 1.1 berikut mendiskripsikan skema analisis permasalahan dan isu strategis pelaksanaan reformasi birokrasi.



Gambar 1.1 Skema Analisis Permasalahan dan Isu Strategis



B Arah Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2022 – 2024

Berdasarkan skema analisis sebagaimana tercantum dalam Gambar 1.1, maka arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi 2022 – 2024 sebagai berikut:

1. Melanjutkan capaian reformasi birokrasi sebelumnya, untuk selanjutnya fokus pada upaya menuju birokrasi kelas dunia; antara lain penyederhanaan birokrasi, penyederhanaan kebijakan/regulasi, transformasi SDM aparatur serta transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
2. Meningkatkan kontribusi PD pengampu (*leading sector*) 8 area perubahan sebagai dinamisator area perubahan yang diampu.
3. Meningkatkan intensitas partisipasi PD dalam perubahan.
4. Memperluas cakupan partisipasi pimpinan dan bawahan dalam perubahan.
5. Meningkatkan ruang partisipasi bagi akademisi, masyarakat dan dunia usaha.
6. Meningkatkan kontribusi Agen Perubahan sebagai *role model* dan dinamisator perubahan.
7. Menjadikan 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi sebagai *tools* bagi PD untuk peningkatan kinerja dan integritas.
8. Meningkatkan upaya monitoring dan evaluasi berkelanjutan.

Selanjutnya strategi pelaksanaan reformasi birokrasi 2021 – 2024 sebagai berikut:

1. Sistemik-konektif-kolaboratif, artinya antar entitas (unit kerja/PD), antar pelaksana perubahan, dan dalam antar pemangku kepentingan saling terhubung dalam agenda besar pencapaian tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2. Pengarusutamaan reformasi birokrasi melekat pada setiap penyelenggaraan tugas/fungsi/program/kegiatan PD.
3. Integratif, artinya seluruh upaya reformasi birokrasi diarahkan untuk peningkatan kinerja dan integritas Pemerintah Daerah KAB BOLMONG.
4. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan jangkauan komunikasi, informasi, edukasi, advokasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

C Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2022 - 2024

Berdasarkan analisis isu strategis, arah kebijakan dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut di atas, Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 – 2024 sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 berikut:



Tabel 2.
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Tahun 2022-2024

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Manajemen Perubahan	Peningkatan intensitas koordinasi, pendampingan, monitoring dan evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah KAB BOLMONG	Prosentase jumlah rencana kerja tahunan Tim yang telah direalisasikan dengan baik	Meta Indikator : Jumlah Rencana Kerja Tahunan Tim yang telah direalisasikan dengan baik dibagi jumlah rencana kerja tahunan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah KAB BOLMONG Rencana Tahunan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah KAB BOLMONG setidaknya terdiri dari: - Koordinasi berkala oleh Tim Pengarah sekurang-kurangnya 4 (empat) kali setahun. - Monitoring capaian reformasi birokrasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun - Evaluasi capaian reformasi birokrasi dan tindak lanjut LHE Kementarian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refromasi Birokrasi berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun.	100%	100%	100%	100%	Koordinasi, monitoring dan evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah KAB BOLMONG	-	Bagian Organisasi Setda KAB BOLMONG sebagai Sekretariat Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah KAB BOLMONG
	Peningkatan kapasitas Tim Reformasi Birokrasi PD dalam mengelola perubahan	Persentase jumlah Tim Reformasi Birokrasi PD yang telah baik dalam mengelola perubahan internal	Meta Indikator: Jumlah Tim Reformasi Birokrasi PD yang telah baik dibagi jumlah PD kali 100% Kriteria Tim yang telah baik: - Tim melaksanakan internalisasi/pendampingan pelaksanaan rencana aksi reformasi	70%	80%	90%	100%	Rapat koordinasi dengan Tim Reformasi Birokrasi PD Pendampingan Tim Reformasi Birokrasi PD	1. Menyusun dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi PD 2. Menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi PD	Bagian Organisasi Setda KAB BOLMONG PD Leading Sector

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			birokrasi secara berkala; - Tim melaksanakan monitoring dan evaluasi capaian rencana aksi secara berkala; - Hasil Monitoring dan evaluasi internal oleh Tim telah ditindaklanjuti; - Pimpinan aktif melaksanakan pembinaan reformasi birokrasi secara berkala; dan - Minimal 70% Rencana Aksi Reformasi Birokrasi telah dilaksanakan					Monitoring dan evaluasi capaian Tim Reformasi Birokrasi PD	3. Merealisasikan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala pelaksanaan reformasi birokrasi 5. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan 6. Melaporkan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi 7. Menindaklanjuti rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Pemda KAB BOLMONG	
	Peningkatan kapasitas Agen Perubahan PD	Persentase jumlah PD yang Agen Perubahannya telah menghasilkan perubahan	Meta Indikator: Jumlah PD yang Agen Perubahannya telah menghasilkan perubahan dibagi jumlah PD kali 100% Kriteria perubahan: - Perubahan yang berdampak pada efisiensi cara kerja; - Perubahan yang berdampak pada efisiensi anggaran; - Perubahan yang berdampak	70%	80%	90%	100%	Rapat koordinasi dengan Agen Perubahan PD Konsultasi dan Pendampingan Agen Perubahan PD	1. Mengusulkan Agen Perubahan PD 2. Mendorong peran Agen Perubahan	Bagian Organisasi Setda KAB BOLMONG

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			pada kenyamanan lingkungan kerja; - Perubahan yang berdampak pada perbaikan pelayanan; dan/atau - Perubahan yang berdampak pada peningkatan integritas.							
Deregulasi Kebijakan	Peningkatan kualitas produk hukum /kebijakan	Persentase usulan/ rancangan produk hukum yang telah memenuhi asas dan prosedur pembentukan produk hukum	Meta Indikator: Jumlah usulan/rancangan produk hukum yang telah memenuhi ketentuan asas dan prosedur pembentukan produk hukum dibagi jumlah usulan/ rancangan produk hukum kali 100%	100%	100%	100%	100%	Pengkajian Naskah Akademik (NA) dan rancangan produk hukum (Hasilnya berupa rekomendasi kelayakan NA dan rancangan produk hukum)	1. Menyusun naskah akademik rancangan produk hukum yang diinisiasi PD 2. Mengonsultasikan rancangan produk hukum 3. Menyusun net konsep rancangan produk hokum 4. Menindaklanjuti hasil rapat pembahasan dan sinkronisasi rancangan produk hukum	Bagian Hukum Setda KAB BOLMONG
								Konsultasi dan pendampingan penyusunan produk hukum daerah		
								Rapat koordinasi pembahasan dan sinkronisasi rancangan produk hukum		
	Deregulasi produk hukum	Persentase produk hukum ber-	Meta Indikator: Jumlah produk hukum	85%	90%	95%	100%	Kajian produk hukum	1.Melaksanakan iden tifikasi dan pemeta	Bagian Hukum Setda KAB BOLMONG

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	yang bermasalah (rumit, menghambat investasi, tumpang tindih, tidak efektif) (<i>Quick Win</i>)	masalah yang sudah ditindaklanjuti dengan deregulasi	bermasalah yang sudah ditindaklanjuti dibagi jumlah produk hukum yang bermasalah kali 100%					Pemantauan dan evaluasi implementasi produk hukum Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil kajian/evaluasi	an produk hukum bermasalah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi PD 2. Melaporkan hasil pemetaan kepada Biro Hukum 3. Menindaklanjuti rekomendasi hasil kajian/evaluasi produk hukum	
Penataan dan Penguatan Organisasi	Penguatan Organisasi Berbasis Kinerja	Persentase jumlah PD yang kelembagaannya inline dengan sasaran kinerja PD	Meta Indikator: Jumlah PD yang kelembagaannya inline dengan sasaran kinerja PD dibagi jumlah PD kali 100% Terminologi kelembagaan tidak hanya berkaitan dengan struktur tetapi juga tugas, fungsi dan tata kerja	100%	100%	100%	100%	Pendampingan penerapan organisasi berbasis kinerja Monitoring dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah	1. Melaksanakan identifikasi dan pemetaan kelembagaan yang tidak inline dengan mandat kinerja dan sasaran kinerja PD 2. Melaporkan hasil pemetaan kepada Biro Organisasi 3. Menindaklanjuti rekomendasi Biro Organisasi atas hasil pemetaan	Bagian Organisasi Setda KAB BOLMONG
	Penyederhanaan struktur organisasi (<i>Quick Win</i>)	Persentase jumlah PD yang kelembagaannya berbentuk struktur	Meta Indikator: Jumlah PD yang kelembagaannya berbentuk struktur fungsional dibagi Jumlah PD kali 100%	35%	55%	65%	75%	Analisis kelembagaan perangkat daerah	1. Melaksanakan identifikasi dan pemetaan fungsi yang tumpang tindih, fungsi yang belum terakomodir, fungsi	Bagian Organisasi Setda KAB BOLMONG

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		fungsional	Struktur fungsional merupakan struktur kelembagaan yang terdiri dari unsur kepala, unsur staff (pembantu/ penunjang) dan unsur fungsional.						yang tidak efektif, volume beban kerja unit kerja, unit kerja yang tidak inline dengan sasaran kinerja PD 2. Melaporkan hasil pemetaan kepada Biro Organisasi 3. Menindaklanjuti rekomendasi Biro Organisasi atas hasil pemetaan	
Penataan Tata Laksana	Penyederhanaan proses bisnis PD	Persentase jumlah PD yang telah menyederhanakan proses bisnisnya	Meta Indikator: Jumlah PD yang telah menyederhanakan proses bisnisnya dibagi jumlah PD kali 100% Penyederhanaan proses bisnis antara lain penyederhanaan cara kerja, cara pelayanan, penyederhanaan SOP	35%	55%	65%	75%	Pendampingan penyederhanaan proses bisnis dan SOP	1. Menerapkan proses bisnis dan SOP yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan tugas/fungsi 2. Monitoring dan evaluasi berkala pelaksanaan proses bisnis dan SOP 3. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan	Bagian Organisasi Setda KAB BOLMONG
								Monitoring dan evaluasi proses bisnis dan SOP	1. Melaksanakan identifikasi dan pemetaan proses bisnis dan SOP yang tidak efektif dan	Bagian Organisasi Setda KAB BOLMONG

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									tidak efisien 2. Melaporkan hasil pemetaan kepada Biro Organisasi 3. Menindaklanjuti rekomendasi Biro Organisasi atas hasil pemetaan	
	Penguatan pola kerja kolaborasi lintas sektor (<i>Quick Win</i>)	Prosentase PD yang telah menerapkan kolaborasi lintas sektor	Meta Indikator: Jumlah PD yang telah menerapkan kolaborasi lintas sektor dibagi jumlah PD kali 100% Sumber data diambil dari hasil monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan oleh Bappeda	40%	50%	60%	70%	Pendampingan penerapan kolaborasi lintas sektor	1. Melaksanakan pola kerja kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan tugas/fungsi/program/kegiatan 2. Monitoring dan evaluasi berkala pelaksanaan pola kerja kolaborasi lintas sektor 3. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan	Bagian Organisasi Setda KAB BOLMONG Bappeda KAB BOLMONG
								Monitoring dan evaluasi penerapan kolaborasi lintas sektor	1. Menyiapkan data penerapan kolaborasi lintas sektor 2. Menindaklanjuti rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi	Bappeda KAB BOLMONG Bagian Organisasi Setda KAB BOLMONG

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Percepatan transformasi digital (<i>Quick Win</i>)	Persentase layanan digital yang sudah terintegrasi	Meta Indikator: Jumlah layanan digital yang sudah terintegrasi dibagi jumlah layanan digital yang ada kali 100% Layanan terintegrasi merujuk pada ketentuan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	70%	80%	90%	100%	Pendampingan teknis digitalisasi tata kelola pemerintahan/pelayanan publik	1. Mengembangkan dan mengonsultasikan digitalisasi tatakelola pemerintahan/pelayanan public kepada Dinas Kominfo 2. Monitoring dan evaluasi berkala upaya digitalisasi 3. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan	Dinas Kominfo KAB BOLMONG
	Penguatan keterbukaan informasi public	Persentase jumlah PD yang masuk kategori informatif dalam pelayanan informasi public	Meta Indikator: Jumlah PD yang masuk kategori informatif dibagi jumlah PD kali 100% Sumber data dari hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Publik	5%	10%	20%	30%	Pendampingan implementasi keterbukaan informasi publik	1. Melaksanakan dan mengonsultasikan layanan informasi publik kepada Dinas Kominfo 2. Monitoring dan evaluasi berkala pelayanan informasi public	

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									3. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan	
								Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik	1. Melaporkan pelaksanaan layanan informasi publik kepada Dinas Kominfo 2. Menindaklanjuti rekomendasi hasil monev keterbukaan informasi	Dinas Kominfo KAB BOLMONG
								Pengembangan pengelolaan Kearsipan Berbasis Elektronik	1. Melaksanakan dan mengonsultasikan implementasi kearsipan berbasis elektronik 2. Monitoring dan evaluasi berkala implementasi kearsipan berbasis elektronik 3. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bolaang Mongondow Dinas Kominfo Kabupaten Bolaang Mongondow
								Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kearsipan Berbasis Elektronik	3. Menyiapkan data pelaksanaan Kearsipan Berbasis Elektronik	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bolaang Mongondow

										Dinas Kominfo Kabupaten Bolaang Mongondow
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								tronik	4. Menindaklanjuti rekomendasi hasil monev Kearsipan Berbasis Elektronik	
	Penguatan tata kelola pengadaan barang dan jasa	Persentase Capaian pengembangan/ penguatan kelembagaan UKPBJ menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/ Jasa dalam tingkat kematangan strategis	Meta Indikator: Persentase jumlah Dokumen yang dapat diselesaikan dibagi jumlah total dokumen yang dibutuhkan dalam rangka kematangan level strategis. Kriteria instrumen pengukuran dalam melaksanakan pengelolaan kelembagaan UKPBJ yang menggambarkan kapabilitas UKPBJ dan menjadi acuan bagi UKPBJ dalam upaya pengembangan/ penguatan kelembagaan UKPBJ menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/ Jasa merujuk pada ketentuan LKPP	16.67 %	29.17 %	41.67 %	50%	Pendampingan tata kelola pengadaan barang/jasa Koordinasi, Monitoring dan evaluasi penguatan tata kelola pengadaan barang/jasa	1. Memfasilitasi pengembangan kompetensi SDM pengadaan barang/jasa 2. Mengonsultasikan dan melaksanakan pengadaan barang/jasa kepada Unit Kerja Pengadaan Barang / jasa (UKPBJ) sesuai rekomendasi 1. Menyiapkan data yang berkaitan dengan penguatan tata kelola pengadaan barang/jasa 2. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi	Bagian Layanan Pengadaan Setda Bagian Layanan Pengadaan Setda

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Reviu perencanaan kebutuhan pegawai sesuai platform penyederhanaan birokrasi	Persentase jumlah PD yang telah di-reviu kebutuhan pegawai-nya sesuai platform penyederhanaan	Meta Indikator: Jumlah PD yang telah di-reviu kebutuhan pegawainya sesuai platform penyederhanaan birokrasi dibagi jumlah PD kali 100% Hasil reviu ditetapkan dengan	100%	100%	100%	100%	Reviu Analisis Beban Kerja dan Analisis Jabatan	1.Menyiapkan data beban kerja dan informasi jabatan serta mengirimkan kepada Biro Organisasi	Bagian Organisasi Setda
Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		birokrasi	Peraturan Bupati							
	Pemenuhan kebutuhan pegawai sesuai konsep penyederhanaan birokrasi	Tingkat keterisian Pegawai pada PD sesuai kebutuhan	Meta Indikator: Rata-rata tingkat keterisian pegawai pada PD dibandingkan formasi kebutuhan pegawai dalam jabatan Tingkat keterisian didasarkan pada jumlah pegawai yang ditempatkan pada PD dibagi jumlah kebutuhan pegawai kali 100%	83%	85%	90%	92%	Rekrutmen pegawai	1.Mengusulkan kebutuhan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada BKD KAB BOLMONG	BKPP KAB BOLMONG
								Penempatan pegawai	2.Mengusulkan penempatan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja	BKPP KAB BOLMONG
	Reviu Standar Kompetensi Jabatan sesuai proyeksi birokrasi kelas dunia	Persentase jumlah PD yang telah ditetapkan standar kompetensinya	Meta Indikator: Jumlah PD/Unit Kerja yang telah ditetapkan standar kompetensi sesuai proyeksi birokrasi kelas dunia dibagi jumlah PD/Unit Kerja kali 100% Standar Kompetensi sesuai proyeksi birokrasi kelas dunia yang antara lain memiliki karakter: profesional; berIntegritas; berorientasi kepublikan; memiliki budaya pelayanan tinggi; serta berwawasan global	35%	55%	65%	75%	Reviu Standar Kompetensi Jabatan	1.Menyiapkan data unsur/kriteria kompetensi jabatan	Bagian Organisasi Setda BKPP KAB BOLMONG

	Peningkatan Pengukuran Kompetensi	Persentase Jumlah PNS Non Jabatan Fungsional Gol. III/c ke atas yang telah diukur	Meta Indikator: Jumlah PNS non-Jabatan Fungsional Gol. III/c ke atas yang telah diukur kompetensinya dibagi Jumlah PNS non-Jabatan Fungsional Gol. III/c ke atas kali	50%	60%	70%	80%	Uji kompetensi dengan metode sederhana/ sedang/kompleks	1.Menyiapkan data PNS non-Jabatan Fungsional Gol. III/c ke atas	BKPP KAB BOLMONG
Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		kompetensinya	100%							
	Reviu Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi sesuai proyeksi birokrasi kelas dunia	Persentase jumlah PNS yang telah dianalisis kebutuhan pengembangan kompetensinya sesuai proyeksi birokrasi kelas dunia	Meta Indikator: Jumlah PNS yang telah dianalisis kebutuhan pengembangan kompetensinya sesuai proyeksi birokrasi kelas dunia dibagi jumlah PNS kali 100%	50%	60%	70%	80%	Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai	1.Menyiapkan data kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai	BKPP KAB BOLMONG
	Fasilitasi pengembangan kompetensi Pegawai	Persentase jumlah pegawai yang telah mendapatkan treatment pengembangan kompetensi	Meta Indikator: Jumlah pegawai yang telah mendapatkan treatment pengembangan kompetensi dibagi jumlah pegawai kali 100% Pengembangan kompetensi dilakukan dalam bentuk klasikal /nonklasikal/blended	20%	30%	40%	50%	Fasilitasi penyusunan dan pendampingan implementasi Human Capital Development Plan	1. Menyusun Human Capital Development Plan dan melaporkan kepada BKPP 2. Mengusulkan peserta program pengembangan kompetensni	BKPP KAB BOLMONG BKPP KAB BOLMONG
	Pengembangan Corporate University (Quick Win)	Indeks Pengembangan Corporate University	Meta Indikator: Total skor per unsur pengembangan corporate university dibagi total jumlah unsur pengembangan corporate university. Unsur pengembangan corporate university terdiri dari:	20	40	60	80	Penyusunan kebijakan pengembangan Corporate University dan perencanaan penganggaran penyelenggaraan Corporate University	1.Memberikan masukan kebijakan pengembangan Corporate University	BKPP KAB BOLMONG BKPP KAB BOLMONG

			1. Ketersediaan Dokumen Formal Kebijakan Pengembangan Corporate University (bobot 10%) 2. Ketersediaan infrastruktur penyelenggaraan <i>smart learning</i>					Penyediaan infrastruktur, kurikulum, bahan pembelajaran, dan fasilitator pembelajaran berbasis <i>smart learning</i>	1. Memberikan masukan kebutuhan infrastruktur, kurikulum, bahan pembelajaran, dan fasilitator pembelaja	BKPP KAB BOLMONG
Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<i>learning</i> (bobot 15%) 3. Ketersediaan kurikulum pembelajaran yang mendukung <i>smart learning</i> (bobot 15%) 4. Ketersediaan bahan pembelajaran yang mendukung <i>smart learning</i> (bobot 15%) 5. Ketersediaan Fasilitator Pembelajaran (penyelenggara, pengelola, pengajar, mentor) yang mendukung <i>smart learning</i> (bobot 15%) 6. Dukungan kapasitas kerjasama dan kemitraan/ <i>networking</i> dalam penyelenggaraan corporate university (bobot 5%) 7. Kemudahan pegawai mendapatkan informasi program pengembangan kompetensi yang terintegrasi (bobot 5%) 8. Kemudahan/fleksibilitas pegawai mengakses/mengikuti program pengembangan kompetensi sesuai yang dibutuhkan (bobot 10%).						ran berbasis <i>smart learning</i> 1. Melaksanakan identifikasi jenis-jenis agenda pengembangan kompetensi (bimtek, workshop, kursus, seminar, magang, on the job training, mentoring, coaching, e-learning, dsb) yang akan diselenggarakan oleh PD serta melaporkan kepada Badan Diklat 2. Mengomunikasikan dan mengonsultasikan penyelenggaraan agenda pengembangan kompetensi untuk mendapatkan rekomendasi teknis dari Badan Diklat	

			9. Efektifitas program pengembangan kompetensi menjawab kebutuhan peningkatan kompetensi peserta pelatihan (bobot 10%) Untuk memudahkan penilaian, setiap unsur terdiri dari sub-unsur penilaian yang detail dan						3. Menerapkan rekomendasi teknis dalam pelaksanaan agenda pengembangan kompetensi Melaporkan hasil pelaksanaan pengembangan kom-	
Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			terukur. Nilai maksimal keseluruhan unsur yang selanjutnya disebut Indeks Pengembangan Corporate University adalah 100 poin.						petensi kepada Badan Diklat untuk mendapatkan persetujuan/penge- sahan bentuk pengembangan kompetensi	
								Penyelenggaraan pelatihan klasikal /nonklasikal	1. Mengusulkan peserta pelatihan kepada BKPP 2. Membimbing peserta pelatihan selama mengikuti pelatihan	BKPP KAB BOLMONG BKD KAB BOLMONG
								Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan klasikal/nonklasikal	1. Mendampingi alumni pelatihan dalam menerapkan pengetahuan/ke-trampilan yang diperoleh saat pelatihan 2. Memberikan data kinerja alumni pasca pelatihan	BKPP KAB BOLMONG BKPP KAB BOLMONG

	Penguatan manajemen kinerja dan perilaku kerja pegawai (perencanaan kinerja, kontrak/penetapan kinerja, dialog kinerja, penilaian kontrak kinerja)	Persentase jumlah PD yang telah menerapkan manajemen kinerja pegawai dengan baik	Meta Indikator: Jumlah PD yang telah menerapkan manajemen kinerja dengan baik dibagi jumlah PD kali 100% Manajemen kinerja yang baik ditandai: - adanya perencanaan kinerja dan penetapan kinerja bawa	70%	80%	90%	100%	Pendampingan penerapan manajemen kinerja dan perilaku kerja pegawai	1. Melaksanakan manajemen kinerja dan perilaku kerja pegawai 2. Monitoring dan evaluasi berkala implementasi manajemen kinerja dan perilaku kerja pegawai	BKPP KAB BOLMONG
Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dan perilaku kerja, pemberian reward & punishment)		han yang inline dengan kinerja atasan - berjalannya dialog kinerja dan perilaku kerja (termasuk disiplin Pegawai) antara atasan dan bawahan - adanya penilaian kinerja yang obyektif sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi					Monitoring dan evaluasi penerapan manajemen kinerja dan perilaku kerja pegawai	wai 3. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan 1. Menyiapkan data pelaksanaan manajemen kinerja dan perilaku kerja pegawai 2. Menindaklanjuti rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi oleh BKD	
	Penguatan manajemen talenta	Tingkat keterisian jabatan berdasarkan hasil manajemen talenta	Meta Indikator: Jumlah keterisian jabatan berdasarkan hasil manajemen talenta dibagi formasi jabatan kali 100% Manajemen talenta merupakan upaya menyiapkan SDM untuk menduduki formasi jabatan yang ada, dimulai dari penetapan pola	70%	80%	85%	90%	Perumusan pola karier	1. Menyiapkan data pola karir PD	BKPP KAB BOLMONG
								Pengukuran dan pemetaan kompetensi	1. Mengusulkan pegawai yang memenuhi kriteria pemetaan kompetensi	
								Rekrutmen Talent	1. Mengusulkan calon Talent	

			karier, pengukuran dan pemetaan kompetensi, rekrutmen Talent, Pengembangan Talent dan Penempatan Talent dalam jabatan					Pengembangan Talent	1.Mendampingi dan memantau kinerja Talent	
								Promosi-mutasi Talent	1.Melaporkan kinerja Talent	
Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Penguatan Akuntabilitas	Penguatan SAKIP	Nilai Rata-rata AKIP PD di lingkungan Pemerintah Daerah KAB BOLMONG	Meta Indikator: Jumlah nilai AKIP seluruh PD dibagi jumlah PD	84,15	84,99	85,83	86,68	Penguatan Perencanaan dan Pengendalian Pembanguan	1. Menyusun/meriviu Renstra, Rencana Kerja PD, Rencana Kerja dan Anggaran sesuai tata kelola perencanaan dan penganggaran yang baik 2. Menyusun Logical Framework Peencanaan dan Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan 3.Monitoring dan evaluasi kinerja berkala 4.Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan 5.Pengukuran dan pelaporan kinerja berkala didukung data yang berkualitas	Bappeda KAB BOLMONG Bagian Organisasi Setda

								Koordinasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Melaksanakan penatausahaan keuangan sesuai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah 2. Melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai sistem dan	BKD KAB BOLMONG
Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									prosedur pengelolaan keuangan daerah	
								Pendampingan SAKIP PD	1. Menyusun dan menginternalisasikan Perjanjian Kinerja 2. Menyusun dan melaporkan LAKIP	Bappeda KAB BOLMONG Bagian Organisasi Setda KAB BOLMONG
								Evaluasi SAKIP PD	1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi	Inspektorat KAB BOLMONG
Penguatan Pengawasan	Penguatan peran Inspektorat sebagai <i>Quality Assurance</i>	Persentase percepatan penyelesaian TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan)	Meta Indikator: Jumlah Rekomendasi Temuan Internal yang selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah total rekomendasi temuan internal kali 100%	88%	90%	92%	94%	Layanan konsultasi pra-pemeriksaan	1. Mengonsultasikan hal-hal yang berpotensi menjadi temuan pemeriksaan 2. Menindaklanjuti rekomendasi hasil konsultasi	Inspektorat KAB BOLMONG

								Pemeriksaan Re-guler	1. Menyiapkan data yang diperlukan dalam pemeriksaan 2. Menindaklanjuti pra temuan LHP	Inspektorat KAB BOLMONG
								Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan melalui pendampingan	1. Menindaklanjuti LHP 2. Melaksanakan internalisasi LHP untuk perbaikan internal	Inspektorat KAB BOLMONG
Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Peningkatan akuntabilitas per tanggung jawaban pengelolaan keuangan	Jumlah PD yang menyam-paikan laporan keuangan tepat waktu	Meta Indikator: Jumlah PD yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dibagi jumlah PD kali 100%	89	91,5	94	96,5	Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan PD	1.Menyusun Laporan Keuangan sesuai ketentuan	Inspektorat KAB BOLMONG BPKA KAB BOLMONG

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)		Meta Indikator: Jumlah Unit kerja yang memenuhi syarat pengusulan WBK berdasarkan hasil evaluasi TPI (Tim Penilai Internal)	4	4	5	5	Pendampingan pengusulan unit kerja berpredikat WBK	1. Menyusun/meriviu dokumen pembangunan Zona Integritas menuju WBK 2. Melaksanakan internalisasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala capaian pembangunan zona integritas menuju WBK 4. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan	Inspektorat KAB BOLMONG Bagian Organisasi Setda KAB BOLMONG
		Meta Indikator: Jumlah Unit kerja yang memenuhi syarat pengusulan WBBM berdasarkan hasil evaluasi TPI (Tim Penilai Internal)	2	2	2	2	Pendampingan pengusulan unit kerja berpredikat WBBM	1. Menyusun/meriviu dokumen pembangunan Zona Integritas menuju WBBM 2. Melaksanakan internalisasi pembangunan Zona Integritas menuju	Inspektorat KAB BOLMONG Bagian Organisasi Setda KAB BOLMONG

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									WBBM 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala capaian pembangunan zona integritas menuju WBBM 4. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan	
	Penguatan manajemen risiko	Persentase PD yang memiliki dan memperbarui berkala dokumen identifikasi dan analisis risiko	Meta Indikator: Jumlah PD yang memiliki dan memperbarui berkala dokumen identifikasi dan analisis risiko dibagi jumlah PD kali 100%	89%	91,5%	94%	96,5 %	Pendampingan dan monitoring manajemen risiko PD	1. Menyusun/meriviu dokumen register risiko 2. Melaksanakan upaya pengendalian risiko 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala upaya pengendalian risiko 4. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan	Inspektorat KAB BOLMONG

	Pemantauan im- plementasi kebi- jakan pengenda- lian gratifikasi	Persentase PD yang melakukan monitoring dan evaluasi kebij- akan pengenda- lian pengenda-	Meta Indikator: Jumlah PD yang melakukan monitoring dan evaluasi kebi- jakan pengendalian gratifikasi secara berkala serta melaporkan	100%	100%	100%	100%	Monitoring dan evaluasi imple- mentasi kebij- akan pengendalian	1. Melaksanakan u- paya pengendalian gratifikasi 2. Melaksanakan mo-	Inspektorat KAB BOLMONG
Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		lian gratifikasi secara berkala serta melapor- kan kepada Inspektorat	kepada Inspektorat dibagi jumlah PD kali 100%					gratifikasi PD	nitoning dan evalu asi berkala upaya pengendalian grati- fikasi 3. Menindaklanjuti ha sil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan 4. Melaporkan pelak- sanaan pengendali- an gratifikasi ke- pada Inspektorat	

Pemantauan imple-mentasi kebi-jakan penanga-nan benturan kepentingan	Persentase PD yang melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan penanga-nan benturan kepentingan se-cara berkala serta melapor-kan kepada Inspektorat	Meta Indikator: Jumlah PD yang melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan penanganan benturan kepentingan secara berkala serta melaporkan kepada Inspektorat dibagi jumlah PD kali 100%	100%	100%	100%	100%	Monitoring dan evaluasi imple-mentasi kebi-jakan penangan-an benturan kepentingan PD	1. Melaksanakan u-paya antisipasi dan penanganan bentu-ran kepentingan 2. Melaksanakan mo-nitoring dan evalu-asi berkala upaya penanganan bentu-ran kepentingan 3. Menindaklanjuti ha-sil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan 4. Melaporkan pelak-sanaan penanga-nan benturan ke-pentingan kepada Inspektorat	Inspektorat KAB BOLMONG
--	--	--	------	------	------	------	--	---	-------------------------

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas implementasi kebijakan pelayanan	Persentase jumlah Unit Pelayanan yang telah baik dalam mengimplementasikan kebijakan pelayanan	Meta Indikator: Jumlah Unit Pelayanan yang telah baik dalam mengimplementasikan kebijakan pelayanan dibagi jumlah Unit Pelayanan kali 100% Kriteria Unit Pelayanan yang telah baik dalam mengimplementasikan kebijakan pelayanan: - Tersedia Standar Pelayanan (SP) yang tepat guna dan menjadi acuan dalam pemberian pelayanan - Penyusunan SP melibatkan pemangku kepentingan - Dokumentasi SP ditetapkan, dipublikasikan, dan mudah diakses oleh masyarakat. - Maklumat Pelayanan telah dipublikasikan kepada seluruh lapisan masyarakat - Secara berkala melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang melibatkan pengguna layanan. - Informasi hasil SKM dipublikasikan dan mudah diakses oleh masyarakat. - Hasil SKM telah ditindaklanjuti.	85%	90%	95%	100%	Pendampingan implementasi kebijakan pelayanan publik	1. Menyusun/meriviu berkala dokumen standar pelayanan 2. Melaksanakan internalisasi standar pelayanan dan publikasi maklumat pelayanan 3. Melaksanakan SKM berkala 4. Mempublikasikan hasil SKM 5. Menindaklanjuti hasil SKM 6. Monitoring dan evaluasi berkala implementasi kebijakan pelayanan public. 7. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan	Bagian Organisasi Setda KAB BOLMONG
								Monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan pelayanan	1. Menyiapkan data capaian pelaksanaan kebijakan pelayanan public 2. Menindaklanjuti rekomendasi hasil monitoring dan	

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									evaluasi	
	Peningkatan profesionalisme SDM pelayanan public	Persentase jumlah Unit Pelayanan yang telah baik dalam meningkatkan profesionalisme SDM pelayanan	Meta Indikator: Jumlah Unit Pelayanan yang telah baik dalam meningkatkan profesionalisme SDM pelayanan dibagi jumlah Unit Pelayanan kali 100% Kriteria Unit Pelayanan yang telah baik dalam meningkatkan profesionalisme SDM pelayanan: - Terdapat kode etik pelayanan yang telah diinternalisasikan secara berkala - Terdapat upaya pengembangan kompetensi SDM pelayanan secara berkala - Telah menerapkan sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i> kepada SDM pelayanan publik	10%	15%	20%	25%	Pendampingan peningkatan profesi onalisme SDM pelayanan publik	1. Menyusun/meriviu berkala kode etik pelayanan 2. Melaksanakan internalisasi dan pe negakan kode etik pelayanan 3. Melaksanakan upaya peningkatan kompetensi SDM secara berkala 4. Menyusun dan me nerapkan sistem reward dan punish ment 5. Monitoring dan eva luasi berkala upaya peningkatan profe sionalisme SDM pelayanan public 6. Menindaklanjuti ha sil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan	Bagian Organisasi Setda KAB BOLMONG
								Monitoring dan evaluasi upaya peningkatan kompetensi SDM pelayanan	1. Menyiapkan data capaian upaya pe- ingkatan kompe- tensi SDM 2. Menindaklanjuti re	Bagian Organisasi Setda KAB BOLMONG

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									komendasi hasil monitoring dan evaluasi	
	Peningkatan upaya pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan	Persentase jumlah Unit Pelayanan yang telah baik dalam menyediakan sarana dan prasarana pelayanan publik	Meta Indikator: Jumlah Unit Pelayanan yang telah baik dalam menyediakan sarana dan prasarana dibagi jumlah Unit Pelayanan kali 100% Kriteria Unit Pelayanan yang telah baik dalam menyediakan sarana dan prasarana pelayanan publik: - Tersedia tempat parkir yang aman, nyaman dan mudah diakses - Tersedia ruang tunggu yang nyaman. - Tersedia toilet khusus pengguna layanan. - Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus - Tersedia ruang laktasi/nursery, arena bermain anak. - Tersedia front office untuk layanan konsultasi dan informasi tatap muka. - Tersedia front office untuk layanan pengaduan tatap muka.	45%	50%	55%	60%	Pendampingan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan	1. Menyusun/meriviu berkala kebutuhan sarana prasarana pelayanan sesuai masukan pemangku kepentingan 2. Melaksanakan upaya pemenuhan sarana prasarana 3. Monitoring dan evaluasi berkala upaya pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan 4. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan	Bagian Organisasi Setda KAB BOLMONG
								Monitoring dan evaluasi upaya pemenuhan sarana prasarana pelayanan	1. Menyiapkan data capaian upaya pemenuhan sarana prasarana pelayanan 2. Menindaklanjuti rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi	Bagian Organisasi Setda KAB BOLMONG

[illegible]

[illegible]

Area Perubahan	Rencana Aksi	Indikator Capaian	Keterangan Indikator	Target Capaian Indikator				Kegiatan Utama PD Pengampu (Leading Sector)	Kegiatan Utama PD Pelaksana	Penanggung Jawab
				2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									4. Menindaklanjuti rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi	
	Pengembangan inovasi	Persentase jumlah Unit Pelayanan yang telah baik dalam mengembangkan inovasi	Meta Indikator: Jumlah Unit Pelayanan yang telah baik dalam mengembangkan inovasi dibagi jumlah Unit Pelayanan kali 100% Kriteria Unit Pelayanan yang telah baik dalam mengembangkan inovasi: - Tersedia inovasi, dilaksanakan lebih dari 1 tahun dan berkelanjutan, dapat atau sudah direplikasi - Secara konsisten melaksanakan evaluasi berkala terhadap upaya inovasi yang telah dilakukan - Hasil evaluasi telah digunakan untuk perbaikan upaya inovasi	10%	15%	20%	25%	Pembinaan inovasi pelayanan	1. Mengembangkan budaya inovasi, antara lain membentuk kelompok diskusi inovasi 2. Melaksanakan uji coba bentuk-bentuk inovasi tata kelola pemerintahan/pelayanan public kepada pengguna layanan 3. Monitoring dan evaluasi berkala upaya pengembangan inovasi 4. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi dengan perbaikan	Bagian Organisasi Setda KAB BOLMONG
								Kompetisi inovasi pelayanan	1. Mengikuti tahapan-tahapan kompetisi inovasi pelayanan 2. Menindaklanjuti hasil kompetisi dengan pengembangan lebih lanjut	Bagian Organisasi Setda KAB BOLMONG

D. Hasil yang Diharapkan

Sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional periode ketiga, akhir periode Road Map pada tahun 2024 birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow diharapkan mencapai kondisi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3
Hasil yang Diharapkan pada Tahun 2024

No	Hasil yang Diharapkan	Indikator Keberhasilan
1.	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indeks Perilaku Anti Korupsi level Baik
		Indeks Kapabilitas APIP Level 3
		Indeks Maturitas SPIP Level 3
		Predikat SAKIP BB
		Opini BPK WTP
		Indeks Perencanaan Level Baik
		Indeks Reformasi Hukum Level Baik
		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Level 4 (Strategis)
2.	Birokrasi yang kapabel	Indeks Kelembagaan Baik
		Indeks SPBE Level 3
		Indeks Pengawasan Kearsipan Baik
		Indeks Profesionalitas ASN Baik
		Indeks Merit System Level 3 (Baik)
		Indeks Kepemimpinan Perubahan Baik
		Indeks Kualitas Kebijakan Baik
3.	Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik Sangat Baik

BAB IV

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2022 – 2024

A. Perencanaan

Kinerja merupakan dasar pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam upaya menjaga konsistensi arah, kebijakan, rencana aksi dan target kinerja yang ingin dicapai, disusun dokumen perencanaan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pada tingkat Pemerintah Daerah disusun dokumen perencanaan dalam bentuk Road Map Reformasi Birokrasi, yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi untuk level unit Pemerintah Daerah. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah disusun dengan mengacu pada Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Nasional dan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah KAB BOLMONG, untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Periodisasi Road Map maksimal 5 (lima) tahun.
2. Pada tingkat Perangkat Daerah (PD) disusun dokumen perencanaan dalam bentuk Rencana Aksi Reformasi Birokrasi PD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala PD. Rencana Aksi disusun dengan merujuk pada informasi terdapat pada kolom 10 (Kegiatan Utama PD Pelaksana) berdasarkan berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi untuk level unit PD beserta Unit Pelaksana Teknis PD. Masa berlaku Rencana Aksi maksimal satu tahun dan dapat direvisi atau ditetapkan kembali untuk periode berikutnya sepanjang masih relevan dengan perkembangan lingkungan strategis.

3. Perencanaan pada tingkat PD dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Melibatkan peran aktif pimpinan, Tim Reformasi Birokrasi PD dan Agen Perubahan.
 - b. Identifikasi (diagnose) isu/hambatan/permasalahan yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja PD, termasuk akuntabilitas kinerja Unit Pelaksana Teknis yang dikoordinasikan. Diagnosa hambatan/permasalahan dilakukan pada 8 (delapan) area perubahan, meliputi:
 - 1) Aspek manajemen perubahan, berkaitan dengan sejauhmana upaya pengelolaan perubahan telah menghasilkan *mindset* (pola pikir) dan *cultureset* (cara kerja) ASN yang lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional dan berintegritas? Apa yang masih menjadi permasalahan?
 - 2) Aspek regulasi/kebijakan, berkaitan dengan sejauhmana regulasi/kebijakan yang diinisiasi oleh PD tidak menghambat pelayanan dan/atau investasi? Apa yang masih menjadi permasalahan?
 - 3) Aspek kelembagaan, berkaitan dengan sejauhmana kelembagaan PD telah efektif, efisien dan adaptif terhadap dinamika perubahan? Apa yang masih menjadi permasalahan?
 - 4) Aspek tata laksana, berkaitan dengan sejauhmana sistem, proses, dan prosedur kerja telah efektif, efisien dan responsif terhadap publik yang dilayani? Apa yang masih menjadi permasalahan?
 - 5) Aspek sumber daya manusia aparatur, berkaitan dengan sejauhmana SDM aparatur telah mencukupi, kompeten, berkinerja, berintegritas dan terpenuhi hak-haknya? Apa yang masih menjadi permasalahan?
 - 6) Aspek akuntabilitas, berkaitan dengan sejauhmana perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja telah efektif, efisien dan akuntabel? Apa yang masih menjadi permasalahan?
 - 7) Aspek pengawasan, berkaitan dengan sejauhmana upaya pengawasan internal telah menghasilkan budaya anti korupsi dan budaya integritas? Apa yang masih menjadi permasalahan?
 - 8) Aspek pelayanan public, sejauhmana upaya pembinaan pelayanan publik telah menghasilkan budaya pelayanan prima? Apa yang masih menjadi permasalahan?
 - c. Hambatan/permasalahan yang mengganggu kinerja PD dalam mencapai sasaran strategis secara akuntabel sebagaimana telah diidentifikasi dalam langkah huruf a, selanjutnya diantisipasi dengan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi PD.

B. Pengorganisasian Pelaksanaan

Reformasi birokrasi dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan sistemik-kolaboratif antar entitas (entitas Pemerintah Daerah dan entitas PD), antar pelaksana perubahan, dan antar pemangku kepentingan saling terhubung dalam agenda besar pencapaian tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. Pilar-pilar ekosistem pelaksanaan reformasi birokrasi terdiri dari:



1. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai pengarah, fasilitator, dinamisator dan evaluator pelaksanaan reformasi birokrasi entitas Pemerintah Daerah dan entitas PD. Kelompok Kerja Area Perubahan pada Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah yang beranggotakan PD Pengampu (*Leading Sector*) area perubahan melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi dan advokasi pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi sesuai area perubahan yang diampu.
2. Tim Reformasi Birokrasi PD yang berfungsi sebagai fasilitator, dinamisator dan asesor pelaksanaan reformasi birokrasi entitas PD.
3. Agen Perubahan yang berfungsi sebagai Role Model dan sekaligus Koordinator *Co-Reform Space* entitas PD.
4. Akademisi, masyarakat, dan dunia usaha yang aktif memberikan masukan terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik.
5. Sekretariat Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yang berkedudukan di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, sekaligus *ex-officio* Sekretariat Ruang Kolaborasi Reformasi Birokrasi (*Co-Reform Space*). yang memiliki fungsi antara lain:
 - a. sebagai *unit help desk* (layanan konsultasi dan data/informasi) terkait reformasi birokrasi.
 - b. sebagai penghubung antar ekosistem secara virtual (menggunakan aplikasi dan media sosial) dan/atau tatap muka langsung.

Melalui Ruang Kolaborasi Reformasi Birokrasi (*Co-Reform Space*) memungkinkan terjadi percepatan pertukaran data/informasi, aspirasi, inspirasi, permasalahan, praktek baik (*best practices*), keahlian, dokumentasi bukti-bukti pelaksanaan, laporan kemajuan, serta rekomendasi atas permasalahan-permasalahan yang terkait reformasi birokrasi.

C. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan tahap yang krusial. Tantangan mewujudkan birokrasi berkarakter kelas dunia mengharuskan pelaksanaan reformasi birokrasi menggunakan pola yang lebih terstruktur, sistemik, partisipatif, kolaboratif dan saling terhubung secara virtual dan/atau tatap muka langsung melalui Ruang Kolaborasi Reformasi Birokrasi (*Co-Reform Space*). Secara umum kolaborasi dapat dilaksanakan setiap saat untuk mendiskusikan dinamika tantangan dan permasalahan reformasi birokrasi. Oleh karena itu pada tahap pelaksanaan dilakukan upaya-upaya penguatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam setiap upaya pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi.
2. Meningkatkan intensitas sosialisasi dan kampanye upaya-upaya reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan kepada seluruh pihak yang terlibat.
3. Meningkatkan intensitas komunikasi, informasi dan edukasi internal kepada seluruh pihak yang terlibat untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam gerakan reformasi birokrasi
4. Meningkatkan intensitas partisipasi komunikasi, informasi dan edukasi dalam Ruang Kolaborasi Reformasi Birokrasi (*Co-Reform Space*).
5. Mendokumentasikan setiap capaian perubahan yang sudah dihasilkan dan mempublikasikan secara luas kepada para pemangku kepentingan.

D. Monitoring dan Evaluasi

Salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan reformasi, baik pada entitas Pemerintah Daerah maupun entitas PD adalah upaya monitoring dan evaluasi. Pada tahap ini dilakukan upaya penguatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam setiap upaya monitoring dan evaluasi capaian pelaksanaan reformasi birokrasi.
2. Monitoring dilaksanakan secara berkala setiap triwulan untuk memastikan Road Map/Rencana Aksi Reformasi Birokrasi PD dilaksanakan sesuai tata kala dan terdokumentasi dengan baik; mendapatkan data/informasi capaian pelaksanaan dan kendala pelaksanaan; serta merumuskan langkah perbaikan/percepatan.
3. Evaluasi dilaksanakan setiap tahun untuk mendapatkan data capaian hasil, data perbandingan kondisi sebelum dan sesudah serta kendala pelaksanaan.
4. Menindaklanjuti setiap hasil monitoring dan evaluasi dengan upaya perbaikan berkala.

E. Pelaporan

Laporan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi disampaikan menggunakan aplikasi Co-Reform Space dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Laporan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk entitas Pemerintah Daerah diisi oleh Admin PD Pengampu (*Leading Sector*) area perubahan.
2. Laporan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi untuk entitas PD diisi oleh Admin PD setelah datanya diverifikasi oleh Asesor PD.

BAB V
PENUTUP

Pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2022 - 2024 merupakan fase yang sangat krusial untuk mewujudkan karakter birokrasi berkelas dunia. Tantangan untuk mewujudkan karakter birokrasi kelas dunia tidak ringan, namun keberhasilan mewujudkannya akan sangat berdampak pada meningkatnya kepercayaan dunia dan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah. Kepercayaan yang tinggi terhadap birokrasi pemerintah selanjutnya akan berdampak pada optimalnya pelaksanaan setiap program-program pemerintah.

Oleh karena itu setidaknya 3 (tiga) hal perlu dipersiapkan untuk menuju birokrasi kelas dunia. Pertama, kejelasan peta jalan (road map) reformasi birokrasi. Kedua, pola pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih terstruktur, sistemik, partisipatif, kolaboratif dan saling terhubung sebagai pilihan strategi utama. Melalui strategi ini diharapkan reformasi birokrasi menguat menjadi sebuah gerakan bersama, gotong-royong memperbaiki tata kelola pemerintahan menuju birokrasi kelas dunia. Ketiga, komitmen, kesungguhan dan konsistensi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow menjalani proses perubahan menuju peradaban birokrasi kelas dunia.

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 


LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	
2	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	